

**ANALISIS PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*
(STUDI *E-MONEV* BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021)**

(Skripsi)

**Oleh
Agung Saputra
NPM 1816041014**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* (STUDI *E-MONEV* BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021)

Oleh
Agung Saputra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dan apa saja faktor utama yang mempengaruhi proses pengembangan yang dilakukan, dengan berdasarkan pada indikator sukses pengembangan *E-Government* dari *United Nations Online Network in Public Administration and Finance* yang menyesuaikan kondisi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan *E-Monev* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 terdapat 7 indikator yang memberikan pengaruh besar dan kontribusi yang baik terhadap proses pelaksanaan kebijakan pengembangan *E-Monev*, yang diantaranya, indikator Ketersediaan pendanaan. Koordinasi. Kerangka hukum. Infrastruktur informasi teknologi. Kepemimpinan dan komitmen politik jangka panjang. Kesepakatan publik. dan yang terakhir indikator Monitoring dan evaluasi program *Electronic Government*. Ke-7 poin indikator tersebut merupakan indikator yang memiliki pengaruh besar terhadap jalannya implementasi kebijakan pengembangan *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk pengembangan tahun 2021 ini, hal ini dilihat dari sistem pelaksanaan kebijakan pengembangan yang dimana berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki potensi Sumber Daya yang mumpuni untuk implementasi kebijakan ini walaupun sepenuhnya belum berjalan dengan sempurna, dan juga dilihat dari sudut pandang pada pengaruh yang ditimbulkan terhadap sistem manajemen pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan yang untuk saat ini telah berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk 3 indikator lainnya, seperti indikator Perencanaan untuk pengembangan SDM dan infrastruktur teknis. Keahlian dan budaya dari pelayanan masyarakat. dan Privasi dan keamanan dari transaksi. Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan pengembangan sistem *E-Monev*.

Kata kunci: Analisis Pengembangan *E-Government*, *E-Monev* Sumatera Selatan, 2021.

ABSTRACT

ANALYSIS OF *E-GOVERNMENT* DEVELOPMENT (*E-MONEV* STUDY OF THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY OF SOUTH SUMATERA PROVINCE IN 2021)

By :

Agung Saputra

This study aims to find out how the development of the *E-Monev* system for the Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province in 2021 and what are the main factors that influence the development process carried out, based on the successful indicators of *E-Government* development from the United Nations Online Network in Public Administration and Finance that adjusts the conditions at the Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province. The results showed that the implementation of the *E-Monev* development policy at the Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province in 2021 contained 7 indicators that had a major influence and good contribution to the process of implementing the *E-Monev* development policy, which included the availability of funding indicators. Coordination. Legal framework. Information technology infrastructure. Long term leadership and political commitment. Public agreement. and the last indicator is Monitoring and evaluation of the Electronic Government program. The 7 indicator points are indicators that have a major influence on the implementation of the *E-Monev* development policy of the Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province for development in 2021, this can be seen from the system of implementing development policies which based on the results of the study show that The Regional Development Planning of the South Sumatra Province already has the potential of qualified resources for the implementation of this policy, although it has not yet been fully implemented, and also from the perspective of the influence it has on the development management system in South Sumatra Province, which for now has been running better. from the previous year. As for the other 3 indicators, such as the Planning indicator for human resource development and technical infrastructure. Community service skills and culture. and Privacy and security of transactions. Based on the results of the study, it shows that these indicators do not have a major influence on the implementation of the *E-Monev* system development policy.

Kata Kunci : Analysis of *E-Government* Development, *E-Monev* South Sumatra, 2021.

**ANALISIS PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*
(STUDI *E-MONEV* BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021)**

Oleh

AGUNG SAPUTRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT (STUDI E-MONEV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021)**

Nama Mahasiswa : Agung Saputra

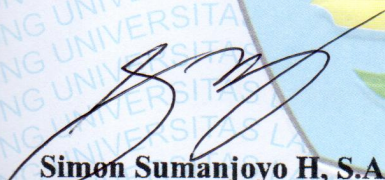
Nomor Pokok Mahasiswa : 1816041014

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing,



Simon Sumanjyo H, S.A.N., M.P.A.

NIP. 19810628 200501 1 003


Intan Fitri Meutia M.A., Ph.D

NIP. 19850420 200812 2 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara,


Meliyana, S.I.P., M.A.

NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.**

Sekretaris

: **Intan Fitri Meutia M.A., Ph.D**

Penguji

Bukan Pembimbing : **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 April 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 25 April 2022
Yang membuat pernyataan,



Agung Saputra
NPM 1816041014

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Talang Padang pada tanggal 7 Maret 2001, Penulis merupakan putra dari Bapak Febi Sugara dan Ibu Devi, anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis memulai jenjang pendidikan di SD Negeri 02 Talang Padang Kabupaten Empat Lawang. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 05 Tebing Tinggi yang selesai pada Tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi yang selesai pada Tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SNMPTN dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menjalani perkuliahan penulis aktif mengikuti beberapa organisasi kampus seperti di antaranya Kopr Muda XIV BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) tingkat universitas Tahun 2018, dan menjadi Staf Dewan Perwakilan Mahasiswa pada Tahun 2020-2021.

Penulis melaksanakan pengabdian masyarakat pada bulan Januari dan Februari Tahun 2021 melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 40 hari di Desa Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian pada bulan Agustus Tahun 2021 Penulis melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) melalui program MBKM (Magang Bersertifikat Kampus Merdeka) selama 6 bulan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

MOTTO

**“Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah;
dan Dialah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”**

(QS. As-Saff: 1)

**“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak
dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”**

(QS. Yasin: 40)

**“Maka janganlah sekali-kali engkau membiarkan kehidupan dunia ini
memperdayakanmu.”**

(QS. Fathir: 5)

“Tinggalkan yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu.”

(HR. Tirmidzi, An Nasa'i)

**“Dalam melakukan sesuatu, berjalan lambat bukanlah masalah selama tidak
berhenti apalagi berjalan mundur”**

Agung Saputra

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal dan kesempatan, menjadi sebaik-baik pelindung, penolong, dan pemberi kemudahan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Segala ketulusan hati, aku persembahkan karya sederhana ini kepada:

“Ayah dan
Ibuku
Tercinta”

Terima kasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terima kasih atas segala pengorbanan, motivasi yang menguatkan di perantauan, memberisemangat disegala keterbatasan dan mendukung setiap langkahku.

Terima kasih untuk seluruh Dosen, Staf dan teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Pengembangan *E-Government* (Studi *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan yang penulis miliki.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1 Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- 2 Ibu Meiliyana, S.IP., M.A.. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- 3 Bapak Simon Sumanjoyo, S.A.N., M.PA. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingannya selama ini yang sangat detail dalam mengoreksi skripsi penulis agar dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas ilmu, saran dan masukan, semangat dan motivasi yang membangun guna terciptanya skripsi ini, terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis, semoga segala kebaikan yang bapak lakukan bernilai pahala dari Allah SWT.

- 4 Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji Utama skripsi penulis. Terima kasih atas semua saran dan masukan yang bapak berikan dalam proses perbaikan skripsi yang mengarahkan penulis agar menghasilkan skripsi yang lebih baik, serta terima kasih atas ilmu, nasehat dan pengertiannya, semoga bapak sehat selalu dan kebaikan yang bapak berikan bernilai pahala dari Allah SWT.
- 5 Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Kedua dan Pembimbing Akademik. Terima kasih atas perhatian, motivasi serta bimbingan yang ibu berikan selama menjalani proses penyusunan skripsi dan perkuliahan yang menuntun penulis agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
- 6 Seluruh Dosen dan Staf Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
- 7 Kedua orang tuaku, Bapak Febi Sugara dan Ibu Devi. Terima kasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terima kasih atas segala pengorbanan, motivasi yang selalu menguatkan ku di perantauan, memberi semangat di segala keterbatasan dan selalu mendukung setiap langkahku.
- 8 Kedua Kakek dan Nenek Saya, Bapak Mamik dan Ibu Nun. Terimakasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas dalam mendidik, membesarkan, memberikan kasih sayang dan do'a yang telah diberikan kepadaku, sehingga aku bisa tumbuh dan menjadi cucu yang nantinya dapat membanggakan keluarga besar.
- 9 Adikku tersayang Dede Kurniawan dan M.Pasha Debian. Terima kasih atas doa dan dukungannya yang telah di berikan selama ini.
- 10 Keluarga Besar Ibu Nuraini, cik tiara, cik imel, cik imam, cik beben, cik gilang, adik-adik sepupu, aisyah, helda, ega, akbar, neza, abel, jihan, kahfi dan lain sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, terimakasih atas, dukungan, motivasi, do'a, bimbingan, arahan, dan

pelajaran yang diberikan selama ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

- 11 Seluruh informan yang telah membantu dalam proses penelitian terutama Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Bapak Hari Wibawa, SP., MM. dan Kasub Pengendalian dan Pelaporan, Ibu Yuniartini, SE. Staf Pengendalian dan Pelaporan Ibu Hera Okta Sapitri, SE. dan Staf Bagian Pelaporan Ibu Widya Rahmayuni, S.Kom, Serta Kepala Bagian Program dan Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Yosi Fatriyanti, SP. Serta Staf Pengendalian dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang, Ibu Choiria, yang telah banyak membantu dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan penulis.
- 12 Teman dan sahabat terbaikku Kholilis Sama'ah, terimakasih atas dukungan, do'a dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
- 13 Teman – temanku di Pejuang Toga Zanu, Fachrezi, Panji, Mita, Asmiati, Gustya, Ade Ranie, dan Azra, . Terima kasih karena telah menjadi keluarga kedua di perantauan, terima kasih atas segala bantuannya, baik suka duka dan canda tawa yang kita lewati bersama selama perkuliahan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan dapat mewujudkan impian kita masing-masing.
- 14 Teman baik saya Albi dan Ibrahim Terima kasih atas dukungan, semangat baik suka maupun duka, serta semua bantuan dan kebaikan yang kalian berikan selama ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dan semoga kita dapat mewujudkan impian kita masing - masing.
- 15 Kakak/Abang yang pernah bersama di organisasi BEM U KBM Unila bang Doni, bang Irfan, dan Kaka/Mba yang pernah Bersama di organisasi DPM U Unila Mba Halfa, Terima kasih atas bantuan, motivasi dan bimbingannya selama ini.

- 16 Ayuk dan Kakak satu daerahku di Unila, Yuk Sherly, Yuk Tensi, Yuk Yosi, Yuk Sari, Yuk Laras, Yuk Sinta, Yuk Okta, Yuk Anggi, Kak Yayan, Kak Daim dan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas doa, arahan, bimbingan, semangat, motivasi dan bantuan yang telah diberikan selama ini. Semoga kita semua dapat sukses dunia akhirat.
- 17 Teman angkatan satu daerahku Haris, Riko, Riyan, Zulkri, Helmi, Vina dan Oktralika. Terima kasih atas semangat, dukungan, dan doanya. Semoga kita semua dapat mewujudkan mimpi kita masing-masing dan dilancarkan segala urusan.
- 18 Adik – adik satu daerahku di Unila, Yolanda, Ayu, Dita dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat dan doanya selama ini.
- 19 Teman – teman Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2018, Adel, Chiesa, Ghandi, Fijay, Salma, Mutiara, Yeni dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Semoga kita senantiasa di berikan kesehatan agar dapat mewujudkan cita – cita yang di impikan.
- 20 Teman – teman alumni IPS Smansapala 2018, Sopan, Anggun, Mutiara, Aat, Yayak, Jefri, Selvy, Mutia, Sinta, Windri, Leti dan Novi, terima kasih atas semangat dan doa yang kalian berikan. Semoga kita semua dapat sukses di jalan masing-masing.
- 21 Bapak Mukhtar dan keluarga. Terima kasih atas doa dan kebaikan yang telah di berikan selama saya kost. Serta terima kasih karena telah menjadi orang tua kedua saya selama saya kuliah di Unila. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah bapak dan keluarga berikan dengan bernilai pahala.
- 22 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih telah menerima kami dengan baik selama pelaksanaan PKL MBKM dan memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi dunia kerja.

23 Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita semua.

Bandar Lampung, 25 Mei 2022

Agung Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. <i>Electronic Government</i>	13
2.2.1. Definisi <i>Electronic Government</i>	13
2.2.2. Dimensi <i>Electronic Government</i>	13
2.2.3. Bentuk-Bentuk <i>Electronic Government</i>	14
2.3. Manajemen Pembangunan	16
2.3.1. Siklus Manajemen Pembangunan.....	16
2.4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.....	19
2.5. <i>E-Monev</i>	21
2.6. Kerangka Teori Terkait Pengembangan <i>Electronic Government</i>	26
2.7. Kerangka Pikir	30
III. METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Fokus Penelitian.....	32
3.3. Lokasi Penelitian.....	33
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	33

3.5. <i>Key Informan</i> (Informasi Kunci).....	35
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7. Validasi Data.....	38
3.8. Teknis Analisis Data.....	39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	43
4.1.1. Karakteristik Wilayah Penelitian	43
4.1.2. Sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	44
4.1.3. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	45
4.1.4. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	46
4.1.5. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	47
4.2. Pengembangan <i>Electronic Government</i>	48
4.2.1. Persiapan Pengembangan <i>E-Government</i> di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	49
4.2.2. Pematangan Pengembangan <i>E-Government</i> di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	49
4.2.3. Pemantapan Pengembangan <i>E-Government</i> di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	50
4.2.4. Pemanfaatan Pengembangan <i>E-Government</i> di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	50
4.3. Hasil Penelitian.....	51
4.4. Pembahasan Penelitian.....	100
V. KESIMPULAN DAN SARAN	117
5.1. Kesimpulan	118

5.2. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN.....	124

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 2. Bentuk-Bentuk <i>Electronic Government</i>	15
Tabel 3. Informasi Kunci.....	35
Tabel 4. Subjek Wawancara	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Peringkat <i>E-Government</i> Indonesia di Dunia Tahun 2020	3
Gambar 2 Tampilan awal aplikasi <i>E-Monev</i> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	23
Gambar 3 Alur input Pelaporan APBD melalui sistem <i>E-Monev</i> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	24
Gambar 4 Kerangka Pikir	31
Gambar 5 Komponen Analisis Data	41
Gambar 6 Peta Provinsi Sumatera Selatan.....	43
Gambar 7 Strukut Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.	47
Gambar 8 Rapat Koordinasi Sistem <i>E-Monev</i>	65

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era revolusi industri 4.0, Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitasnya dalam mencapai kemajuan bangsa dan negara, dimulai dari peningkatan kualitas pada bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur dan mencakup bidang pemerintahan yang ikut berinovasi dalam memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi yang tersedia di tengah gencarnya perkembangan dan kemajuan globalisasi saat ini. Menurut Holle, Salah satu bentuk dampak positif dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah munculnya sistem digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal sebagai *Electronic Government* atau *e-government* (Muftikhali and Susanto, 2017).

Pada bidang pemerintahan, Pemerintah Indonesia melakukan inovasi layanan dengan pengembangan sistem pelayanan berbasis digital (*online*), layanan digital ini biasa disebut dengan *electronic government*. *Electronic-Government* dapat dianggap sebagai fenomena yang dipicu oleh pengenalan internet dan teknologi, sebaliknya *electronic government* juga dapat dipahami sebagai istilah baru untuk mewakili penggunaan informasi dan teknologi komunikasi dalam kegiatan atau urusan pemerintahan (Laumer and Eckhardt, 2012) .

Implementasi pelayanan berbasis elektronik atau pelayanan yang dilakukan secara online yang disebut sebagai *electronic government*, merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk berbagai keperluan dan kebutuhan seperti pemberian pelayanan kepada masyarakat, penyediaan informasi mengenai pemerintahan atau seluruh kegiatan yang menyangkut tentang urusan-urusan pemerintahan. Implementasi *electronic government* di seluruh dunia telah membuktikan bahwa *electronic government*

menawarkan berbagai manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Salah satu tujuan implementasi *electronic government* adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik (Nugraha, 2018). Menurut Yun dan Opheim menyatakan bahwa *electronic government* bertujuan untuk menyediakan platform dimana warga negara terlepas dari status sosial-ekonomi dapat berpartisipasi pada urusan pemerintahan dan administrasi tanpa memandang nilai status seseorang (Bwalya, 2018).

Pelaksanaan *electronic government* di Indonesia dimulai pada tahun 2001 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang “Telekomunikasi, Media dan Informatika (Telematika)”, dalam Instruksi tersebut dijelaskan bahwa aparatur pemerintah diwajibkan atas penggunaan dan pemanfaatan teknologi telematika untuk mendorong pencapaian *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Dalam proses pengembangan *electronic government* di Indonesia didasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 menyangkut tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic-Government*.” Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan ditetapkannya *electronic government* di Indonesia, diantaranya adalah:

- 1 Bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.
- 2 Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*Electronic Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 3 Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*.
- 4 Bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan dari seluruh unsur kelembagaan

pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* secara nasional.

Untuk melihat grafik peringkat *Electronic Government* Indonesia sejak tahun 2003 hingga tahun 2020, berikut ini penulis sajikan data yang dikutip dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nation Electronic Government Survey* Tahun 2020 yaitu :



Gambar 1 Peringkat *E-Government* Indonesia di Dunia Tahun 2020

Sumber: Kementerian PANRB Republik Indonesia, 2021.

Berdasarkan gambar 1. Pada tahun 2020 kondisi pelaksanaan *electronic government* di Indonesia dengan melihat hasil dari peringkat *E-Government* yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui *United Nations* (UN) *e-Government Survey* 2020 telah menempatkan Indonesia pada peringkat

88 atas pengembangan dan pelaksanaan *electronic government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Hasil di tahun 2020 yang dirilis pada bulan Juli, menunjukkan kenaikan 19 peringkat dibandingkan tahun 2018 yang berada di urutan 107 dan urutan 116 di tahun 2016. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh *Electronic Government Development Index (EGDI) 2020 Indonesia* berhasil naik 35 peringkat pada *e-Participation Index* tahun 2020, dari yang sebelumnya peringkat 92 pada tahun 2018, menjadi peringkat 53 pada tahun 2020 dengan skor 0.7500. Skor ini sudah di atas rata-rata dunia dengan skor 0.5677, di atas rata-rata Regional Asia dengan skor 0.6294, dan juga di atas rata-rata Regional Asia Tenggara dengan skor 0.6126. Hal ini membuat Indonesia naik predikat dari yang sebelumnya termasuk dalam grup *High e-Participation Index* menjadi grup *Very High e-Participation Index*.

Melihat hasil tersebut, dalam dua tahun terakhir sejak diterbitkannya Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), atas kerja sama berbagai pihak, Indonesia telah menunjukkan geliat perubahan kearah yang lebih baik. Namun, tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Nasional yang diketuai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), perlu 4eknik4a strategi perbaikan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dimana salah satu perbaikannya adalah penguatan infrastruktur telekomunikasi yang menjadi salah satu poin terendah dalam penilaian tersebut. Selain itu, penguatan aspek tata 4eknik, layanan, dan sumber daya manusia yang nilainya masih hanya sedikit di atas rata-rata, perlu menjadi perhatian untuk dapat memaksimalkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Indonesia.

Seperti yang diketahui bahwa penerapan *electronic government* tidak hanya dilakukan pada tatanan pemerintah pusat, akan tetapi, penerapan *electronic government* juga diimplementasikan pada pemerintah daerah, salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan salah satu provinsi yang sudah menerapkan *electronic government* pada proses kegiatan pemerintahannya. Khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah menerapkan sistem *e-government* sejak tahun 2009.

Sampai saat ini pada tahun 2021 pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan masih berfokus kepada kinerja birokrasi yang dilakukan secara online sejak kemunculan pandemi Covid-19 di Indonesia, baik dalam memberikan pelayanan kepada publik, maupun kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan, keputusan ini diambil berdasarkan atas pertimbangan kondisi Covid-19 yang sampai saat ini masih melanda beberapa daerah di Indonesia, salah satunya Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini masih berstatus level 1 Covid-19, meskipun Provinsi Sumatera Selatan khususnya kota Palembang yang sudah terbebas dari zona merah Covid-19, tidak menutup kemungkinan pemerintah provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pelonggaran kegiatan pemberian layanan kepada publik maupun kegiatan atau aktivitas pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan secara langsung, maka, untuk itulah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih konsisten dengan kegiatan layanan kepada masyarakat maupun kegiatan antar instansi pemerintahan tetap dilakukan secara digital (*online*) dengan sistem penggunaan melalui web atau aplikasi yang telah disediakan oleh masing-masing instansi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, hal ini terbukti dari pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan semenjak tahun 2015 hingga saat ini pada tahun 2021 masih dilaksanakan secara *online* berdasarkan arahan dan panduan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Sumatera Selatan sendiri, dengan menggunakan sistem *E-Monev*.

Aplikasi sistem *e-Monev* sendiri secara umum dapat dijelaskan sebagai media bagi pemerintah khususnya organisasi perangkat daerah dalam melakukan pelaporan program atau kegiatan tahun berjalan, aplikasi sistem *e-Monev* ini pada awalnya hanya mencakup laporan fisik dan keuangan Perangkat Daerah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Padahal setiap tahun Bappeda Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan, namun tidak semua Perangkat Daerah melaporkan capaian indikator Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sesuai format dan tepat waktu. Untuk itu sejak Mei 2016 dilakukan peningkatan cakupan pada sistem *e-Monev* dengan menambah menu laporan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan, di tahun 2021 pengembangan aplikasi *e-Monev* Provinsi Sumatera Selatan telah mencakup pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Dekonsentrasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Urusan Bersama, Tugas Pembantuan Provinsi, Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota, capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Laporan Dana Alokasi Khusus, Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Verifikasi Lapangan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang Aplikasi sistem *e-Monev* sudah diimplementasikan sejak tahun 2015 berdasarkan instruksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menggunakan sistem *e-Monev* sebagai media pelaporan program atau kegiatan tahun berjalan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tujuannya agar sistem pelaporan program maupun kegiatan tahun berjalan dapat dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan format, dan berdasarkan pada data yang dihimpun dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkup provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan penilaian yang baik terhadap penggunaan sistem *E-Monev* adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sedangkan untuk *user* dilingkup kabupaten/kota sendiri yaitu Kota Palembang yang merupakan kota dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik di Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya Bappeda Litbang Kota Palembang yang tercatat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan penggunaan sistem *e-Monev* terbaik di Provinsi

Sumatera Selatan dalam proses pelaporan program/kegiatan tahun berjalan Kota Palembang.

Dengan adanya penerapan Inovasi sistem *e-Monev* di Sumatera Selatan khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang. Harapannya *e-Monev* dapat mendorong sistem kinerja Lembaga pemerintahan yang efektif dan efisien dalam proses pengendalian dan evaluasi program kebijakan atau kegiatan tahun berjalan.

Sistem *e-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan bisa diakses melalui alamat laman, <https://emonev.bappedasumsel.com/>. Dari hasil evaluasi dan pelaporan data yang termuat pada sistem *e-Monev*, nantinya data tersebut dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam proses dan tahapan pengambilan serta penetapan program kebijakan pemerintah pada periode selanjutnya.

Untuk kondisi saat ini dalam beberapa bulan terakhir sistem *e-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami kendala dari sistem *e-Monev*, dimana kendala tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti, kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (Tenaga Ahli) dibidang Ilmu Telekomunikasi dan kurang baiknya sistem kerjasama oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada pihak pengembang, tidak jelasnya regulasi antara Bappeda Sumatera Selatan dengan pihak yang melakukan pengembangan sistem *e-Monev*, dan masih terdapat permasalahan atau kesenjangan pada implementasi kebijakan pengembangan *E-Government* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tentunya fenomena tersebut bertolak belakang terhadap visi dan misi dari pemerintah Indonesia untuk mewujudkan *Good Governance* dengan menggunakan dan memanfaatkan sistem teknologi dan infomasi di masa revolusi industri 4.0, dan fenomena tersebut juga memberikan pengaruh atau

dampak buruk khususnya dari Bappeda Sumsel maupun kepada seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan proses pelaporan program atau kegiatan tahun berjalan Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan uraian di atas penulis berencana untuk mengkaji sebuah penelitian tentang “*Analisis Pengembangan E-Government (Studi e-Monev Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021)*”.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa masalah yang ingin diteliti antara lain:

- 1 Bagaimana Pengembangan Sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.?
- 2 Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.?

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

- 1 Untuk mengetahui bagaimana pengembangan Sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
- 2 Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

4.1 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi Ilmu Administrasi Negara dalam analisis pengembangan Sistem *e-Monev* yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari Penelitian ini kiranya dapat membantu dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait, Seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Masyarakat Umum dan sebagainya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian tentang “Analisis Pengembangan *E-Government* (Studi *E-Monev* Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)”, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan sehingga dapat mendukung penelitian yang sekarang dan dapat menjadi referensi/acuan bagi penulis untuk memperkaya teori atau memperkaya kajian yang berupa informasi serta temuan-temuan yang dapat mengkaji penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan penelitian.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

	Penelitian Pertama I	Penelitian Kedua II	Penelitian Ketiga III
Nama	Alfian Adi Prasetyo, Herbasuki Nurcahyanto, dan Rihandoyo	Ratna Juita	Toidin, Sasongko, Sutomo
Judul	Analisis Pengembangan <i>E-Government</i> di Kota Semarang (Studi Website Resmi Kota Semarang)	<i>E-Monev</i> Pencapaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah BAPPEDA Kota Payakumbuh	Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi <i>E-Monev</i> (Studi di KPU Kabupaten Jember)
Tujuan	a. Untuk menganalisis pengembangan	a. Menghasilkan sistem evaluasi terhadap pencapaian	Untuk menilai bagaimana implementasi dari sistem <i>E-Monev</i>

	<p><i>e-government</i> di Kota Semarang</p> <p>b. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi di dalam pengembangan <i>e-government</i> di Kota Semarang</p> <p>c. Untuk mengetahui faktor \pm faktor yang mempengaruhi pengembangan <i>e-government</i> di Kota Semarang.</p>	<p>kinerja keuangan dari masing-masing perangkat daerah (<i>e-monev</i>) BAPPEDA Kota Payakumbuh</p> <p>Mempermudah BAPPEDA Kota Payakumbuh dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja keuangan masing-masing perangkat daerah.</p>	<p>pada KPU Kabupaten Jember; apakah berhasil atau gagal, serta mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat implementasinya.</p>
Fokus Penelitian	<p>Penelitian ini berfokus kepada pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan <i>e-government</i> menuju <i>e-city</i> di Kota Semarang.</p>	<p>Penelitian ini berfokus kepada sistem monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing perangkat daerah BAPPEDA Kota Payakumbuh.</p>	<p>Penelitian ini berfokus kepada implementasi sistem <i>E-Monev</i> dengan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat jalannya penggunaan <i>E-Monev</i> di KPU Kabupaten Jember</p>
Hasil Penelitian	<p>Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan, Pengembangan <i>e-government</i> di Kota Semarang masih memiliki beberapa kekurangan yang harus diperbaiki agar para pengguna seperti masyarakat dan pihak-pihak lain</p>	<p>Dengan penerapan sistem baru ini semua data <i>e-Monev</i> akan tersimpan dalam sebuah file database sehingga akan memudahkan dalam proses pencarian data. Dan dengan rancangan sistem baru yang terkomputerisasi,</p>	<p>Dengan menggunakan pendekatan konsep delivery system, yaitu ketepatan waktu, penyelesaian laporan, kesesuaian dengan prosedur, aksesibilitas, keterlibatan pimpinan dan staf secara proporsional,</p>

<p>yang menggunakan website resmi Kota Semarang merasa nyaman dalam mengakses segala informasi yang telah disediakan oleh <i>website</i> resmi Kota Semarang.</p>	<p>diharapkan membantu dalam meminimalkan kesalahan dalam pengolahan data serta keunggulan sistem informasi ini adalah proses percepatan sistem yang dapat mempercepat kinerja dalam pengarsipan data dan pengolahan data sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan waktu.</p>	<p>hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi <i>e-Monev</i> belum memenuhi kinerja (performance) sesuai desainnya.</p>
---	--	--

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

- 1 Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan diatas, pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki judul “**Analisis Pengembangan E-Government (Studi E-Monev Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2021)**” bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengembangan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan apa saja faktor pendukung maupun faktor penghambat pengembangan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dengan menggunakan 10 indikator sukses pengembangan *E-Government* dari (*United Nations Online Network in Public Administration and Finance*) (Rosady, 2018) yang diantaranya : *avaibility of initial funding, skills and culture of the civil services, co-ordination, legal framework, ICT infrastructure, political leaderships and long-term political commitment, public engagement, plans for development of human capital and technical infrastructure, montoring and evaluation, privacy and security.*

2.2 *Electronic Government*

2.2.1 Defenisi *Electronic Government*

Electronic Government adalah layanan *Information and Communication Technologies* (ICT) yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, untuk meningkatkan hubungan antara warga, swasta dan pemerintah. *Electronic Government* juga dapat diartikan sebagai proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah yang saat ini fokus di Indonesia pada implementasi *Electronic Government* (Utama, 2020). *Electronic Government* sendiri bukanlah sebuah perhelatan tunggal dalam waktu yang singkat melainkan sebuah proses evolusioner jangka panjang dalam mentransformasi pemerintah untuk fokus pada layanan masyarakat. Maka, untuk itulah pentingnya membangun sebuah *electronic government* roadmap tingkat tinggi (desain *top-down*) dengan sebuah rencana penetapan secara rinci yang *bottom-up* (Novita, 2014). *The World Bank* memberikan pendefinisian tentang *Electronic Government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti WAN, internet dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan (Indrajit, 2016). Di sisi lain, *United Nation Development Programme* (UNDP) pada suatu kesempatan mendefinisikannya secara lebih sederhana yaitu, *Electronic Government* merupakan pengimplementasian *Information Communication Technology* (ICT) agar dapat meningkatkan hubungan atau memperkuat kerjasama antara pemerintah dengan berbagai pihak-pihak luar (Indrajit, 2016).

2.2.2 Dimensi *Electronic Government*

Adapun dimensi dari *e-government* Menurut Mohhamed Ateeq Alanezi, Ahmed Kamil, dan Shuib Basri menyatakan bahwa *Electronic*

Government merupakan sejauh mana sebuah situs web *electronic government* dapat memfasilitasi dalam memberikan layanan yang kompeten untuk membantu masyarakat, bisnis, dan pemerintahan dalam mencapai administrasi pemerintahan mereka. Terdapat enam kriteria utama yang dikenal dengan dimensi *electronic government*. Enam dimensi *electronic government* tersebut, diantaranya (Adelia et al., 2016):

- a. *Ease of Use* (kemudahan penggunaan) : Kemudahan *e-government* ini bagi masyarakat untuk bisa berinteraksi.
- b. *Trust* (kepercayaan): Kepercayaan masyarakat terhadap *e-government* mengenai kebebasan dari risiko bahaya atau keraguan selama proses layanan secara online.
- c. *Functionality of the Interaction Environment* (fungsional dari interaksi lingkungan) : Peran integral pada *e-government* yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, pengumpulan informasi yang diperlukan dan penggunaan media untuk mengirimkan informasi secara online.
- d. *Reliability* (keandalan) : Sebagai kepercayaan masyarakat terhadap *e-government* mengenai layanan pengiriman yang benar dan tepat waktu. Istilah meliputi fungsi teknis yang benar (aksesibilitas dan ketersediaan) dan layanan yang akurasinya sangat menjanjikan.
- e. *Content and Appearance of Information* (isi dan tampilan informasi) : Kepercayaan masyarakat akan kualitas dari informasi serta penyajiannya (penggunaan yang tepat dari warna, grafis, dan ukuran halaman web).
- f. *Citizen Support* (pendukung) : Bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam pencarian informasi.

2.2.3 Bentuk-Bentuk *Electronic Government*

Menurut (Indrajit, 2016), terdapat 4 Tipe Relasi *electronic government* diantaranya *Government to Citizen/G-to-C* (Pemerintah dengan warga),

Government to Business/G-to-B (Pemerintah dengan swasta), *Government to Government/G-to-G* (Pemerintah dengan pemerintah), *Government-to-Employee/G-to-E* (Pemerintah dengan Pegawai/ASN). Untuk Lebih jelasnya penulis sajikan bentuk-bentuk *Electronic Government* kedalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. Bentuk-Bentuk *Electronic Government*

No.	Bentuk Electronic Government	Penjelasan
1	<i>Government to Citizens</i>	Tipe G-to-C adalah suatu sistem aplikasi yang bisa dianggap umum, dikarenakan tujuan dari pembangunan dan penggunaan berbagai jenis aplikasi/portofolio teknologi informasi yang dibangun dan dijalankan oleh pemerintah yaitu, bertujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (Rakyat) (Indrajit, 2016).
2	<i>Government to Business</i>	Menurut (Indrajit, 2016) diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan sektor bisnis tidak hanya bertujuan untuk memperlancar jalannya perusahaan, akan tetapi jika dipandang lebih jauh dan mendalam banyak hal yang dapat diambil keuntungan dari adanya relasi interaksi yang baik dan efektif antara pemerintah dengan kalangan bisnis.
3	<i>Government to Government</i>	Menurut (Indrajit, 2016) Kebutuhan untuk berinteraksi antara suatu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya di lingkup yang berbau akan diplomasi semata, akan tetapi jika dilihat lebih jauh dan ditelusuri secara mendalam tujuan dari adanya G-to-G adalah untuk mempermudah dan mempererat hubungan Kerjasama antar <i>entity-entity</i> negara (masyarakat, industry, perusahaan dan lain-lain) dalam

- melakukan kegiatan yang mempunyai keterikatan akan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya,, dan lain sebagainya.
- 4 *Government to Employees* Menurut (Indrajit, 2016) tipe relasi G-to-E digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para aparatur sipil negara atau karyawan pemerintahan yang bekerja di beberapa institusi sebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dan diterapkan dengan sistem G-to-E yaitu. Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), diperlukan juga sebagai penunjang proses mutase, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.

Sumber : (Indrajit, 2016)

2.3 Manajemen Pembangunan

Manajemen Pembangunan menurut Siagian adalah upaya atau rangkaian pertumbuhan yang direncanakan dan upaya perubahan yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam konteks pembangunan bangsa (Kato et al., 2021). Sedangkan pengertian manajemen pembangunan menurut Tjokroamidjojo adalah proses dimana pemerintah (pemerintah) terhadap bisnis (administrasi) untuk mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan menuju situasi yang dianggap lebih baik dan lebih maju dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa (Kato et al., 2021).

2.3.1 Siklus Manajemen Pembangunan

Siklus manajemen pembangunan merupakan suatu istilah yang digunakan pada proses perencanaan dan pengelolaan proyek atau program dari suatu lembaga atau perusahaan. Siklus manajemen pembangunan dapat

diartikan sebagai suatu proses rangkaian dari semua fungsi manajemen yang saling berkesinambungan satu sama lain. Meskipun tiap fungsi manajemen dapat diidentifikasi dari segi aktivitas dan tujuan secara terpisah, akan tetapi dalam pelaksanaannya tiap fungsi manajemen tersebut tidak dapat dipisahkan. Setiap tahap dari siklus tersebut menuntun ke tahap berikutnya. Di bawah ini merupakan bentuk siklus manajemen pembangunan. Adapun tahap yang berkesinambungan dalam siklus manajemen adalah sebagai berikut, (Kato et al., 2021).

1. *Planning*

Tahap awal yang harus dilakukan adalah merencanakan suatu program yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau perusahaan. *Planning* meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut (Dakhi, 2016) . Membuat sebuah *planning* sangat dibutuhkan agar dapat dalam prosesnya sesuai yang diinginkan oleh kita. Menurut Tripathi Definisi *planning* adalah : “*Planning means that managers think of their actions in advance. Their actions are usually based on some method, plan, or logic, rather than on a hunch*” (Kato et al., 2021). Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa, seorang manajer dalam merencanakan suatu program didasarkan pada beberapa metode, rencana, atau logika, bukan pada dugaan.

2. *Organizing*

Tahap kedua merupakan pengorganisasian. Pada tahap ini seorang manajer lebih banyak berperan karena pada tahap ini dibutuhkan sosok manajer sebagai seorang leader yang mengorganisir anak buahnya. Menurut Tripathi, Definisi *organizing* adalah : “*Organizing means that managers coordinate the human and material resources of the organisation*” (Kato et al., 2021). Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa, seorang manager bertugas untuk mengkoordinasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan menyesuaikanya dengan material yang

tersedia. Jadi, dalam melakukan organizing perlu adanya pembagian tugas kepada Sumber Daya Manusia yang ada dan menyesuaikannya dengan material yang tersedia. Hal tersebut perlu dilakukan agar ketercapaian planning dapat efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan.

3. *Actuating*

Tahap ketiga merupakan aplikasi atau pelaksanaan dari berbagai *planning* yang sudah di *organizing*. Pada tahap ini tiap individu melaksanakan tugas sesuai dengan posisinya. Tanggung jawab dari setiap individu diperlukan dalam tahap ini. Menurut Tripathi, Definisi *actuating* adalah : “*Actuating means that managers motivate and direct subordinates*” (Kato et al., 2021). Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa, seorang manajer perlu memotivasi anak buah (staff) yang sedang bekerja sesuai dengan posisinya. Hal tersebut perlu dilakukan agar anak buah merasa diperhatikan sehingga setiap anak buah dapat bekerja maksimal. Jika pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan maksimal maka, *planning* yang dibuat dapat mendekati keberhasilan.

4. *Controlling*

Menurut Tripathi, Definisi *controlling* adalah : “*Controlling means that managers attempt to ensure that there is no deviation from the norm and plan*” (Kato et al., 2021) Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa, Control disini dimaksudkan untuk membandingkan rencana (*plan*) dengan hasil (*result*). Hal tersebut dimaksudkan agar hasil yang diperoleh tidak jauh menyimpang dari apa yang telah direncanakan. Jika rencana yang diperoleh sudah sesuai atau tidak terdapat penyimpangan maka, siklus dapat dilanjutkan dengan membentuk *planning* yang baru. Apabila rencana (*plan*) tidak sesuai dengan hasil atau dapat dikatakan terjadi penyimpangan maka, pada tahap inilah dilakukan sebuah *control* untuk mengevaluasi penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. *Control* disini diharapkan pula

dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan *Planning-planning* berikutnya. Agar kesalahan atau penyimpangan yang sama tidak sampai terjadi dua kali.

2.4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Monitoring dan Evaluasi (*monev*) merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengawasan atau pengendalian suatu program dalam pembangunan. Meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, namun monitoring dan evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Monitoring dan evaluasi (*monev*) merupakan unsur dari manajemen yang sangat penting dilaksanakan dalam suatu organisasi swasta dan pemerintahan atau Lembaga, terutama dalam upaya untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan atau program pembangunan yang sedang berjalan benar-benar *on the track* sesuai dengan tujuan rencana kegiatan dan program yang telah direncanakan. Menurut Siagian, pembangunan adalah suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dinyatakan pembangunan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu perubahan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat suatu daerah (Kato et al., 2021).

Untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan atau proyek pembangunan daerah dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, maka harus dilakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Monitoring dilaksanakan dengan maksud agar proyek pembangunan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan menyediakan umpan balik bagi pengelola proyek pembangunan pada setiap tingkatan. Umpan balik ini memungkinkan pemimpin proyek untuk dapat menyempurnakan rencana operasional proyek pembangunan dan mengambil tindakan korektif tepat pada waktunya, jika terjadi masalah dan hambatan (Kato et al., 2021).

1. Monitoring

Monitoring merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan dari penerapan kebijakan yang telah diambil terhadap program pembangunan. Dengan demikian, fokus dari pada kegiatan monitoring adalah berdasarkan pada pelaksanaannya bukan berdasarkan hasil. Artinya, monitoring dilakukan berdasarkan pada kegiatan program pembangunan sedang berlangsung guna mengetahui dan memastikan kesesuaian proses dan capaiannya apakah telah sesuai dengan perencanaan atau untuk memeriksa proses selanjutnya, yaitu untuk mengetahui kondisi atau kemajuannya. Hasil monitoring tersebut akan digunakan sebagai input bagi kepentingan proses selanjutnya, yaitu untuk melakukan evaluasi. Berdasarkan PP 39/2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disebutkan bahwa Monitoring merupakan kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal, dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang akan dipergunakan untuk Mengevaluasi kinerja program. Pada hakikatnya, monitoring bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi bagi tindakan-tindakan yang bersifat korektif sedini mungkin. Kedua, mendukung usaha penyempurnaan (paripurna) perencanaan berikutnya dengan menyediakan informasi tentang perbaikan status perkembangan suatu program.

2. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai yang objektif dan sistematis terhadap suatu program yang sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. Worthen dan Sanders yang mengatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu yang dimaksud dapat diartikan sebagai upaya untuk mencari informasi yang bermanfaat untuk digunakan dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Arikunto and Jabar, 2018). Sebagian besar evaluasi proyek dan program secara langsung atau

tidak langsung berhubungan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pertumbuhan ekonomi (Thomas and Chindarkar, 2019). Evaluasi menurut PP 39/2006, adalah Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Masukan untuk perencanaan yang akan datang. Evaluasi dilakukan secara berkala, menganalisis data yang telah diperoleh dari Monitoring untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan rencana, dan sebagai umpan balik pemerintah kepada pemangku kepentingan utama.

3. Pengendalian

Pengendalian adalah hal suatu hal yang dianggap penting, karena merupakan mata rantai terakhir dalam rangkaian proses manajemen. Dengan pengendalian, dapat diketahui apakah perencanaan kegiatan dan program yang dijalankan telah dilakukan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Pengendalian diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang telah tercapai, apakah telah sesuai dengan rencana yang dibuat atau melenceng dari rencana yang dibuat tersebut. Berdasarkan PP 39/2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan disebutkan bahwa Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

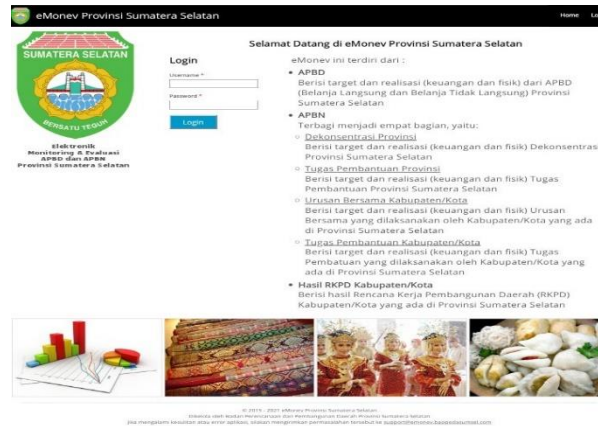
2.5 E-Monev

Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan (PEPP) secara legal diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39/2006). Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan (PEPP) merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang

ditetapkan atau dengan kata lain Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan (PEPP) merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Untuk itulah sistem *e-Monev* menjadi salah satu instrumen Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan (PEPP) yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi hasil pemantauan (data realisasi) pelaksanaan rencana pembangunan. Data dan informasi hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi pembangunan.

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sistem aplikasi *e-Monev* sudah diperkenalkan dan dijalankan pada bulan September Tahun 2015, dalam rangka melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah, di tahun 2021 dasar hukum yang digunakan dalam proses pengendalian dan evaluasi (*E-Monev*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 001/SE/BAPPEDA/2021 Tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021.

Secara umum implementasi aplikasi *e-Monev* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mempermudah pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pelaporan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian terhadap capaian realisasi capaian fisik, keuangan APBD/APBN maupun indikator RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan mempermudah pelaksanaan evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan yang dimana sistem *E-Monev* sendiri dikelola dan dijalankan oleh Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis (Sub Bidang Pengendalian), dengan tujuan utamanya yaitu, agar laporan hasil pelaksanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai pada format pelaporan yang telah ditetapkan. Berikut ini, penulis sajikan tampilan awal sistem *e-monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada gambar 2 dibawah ini :

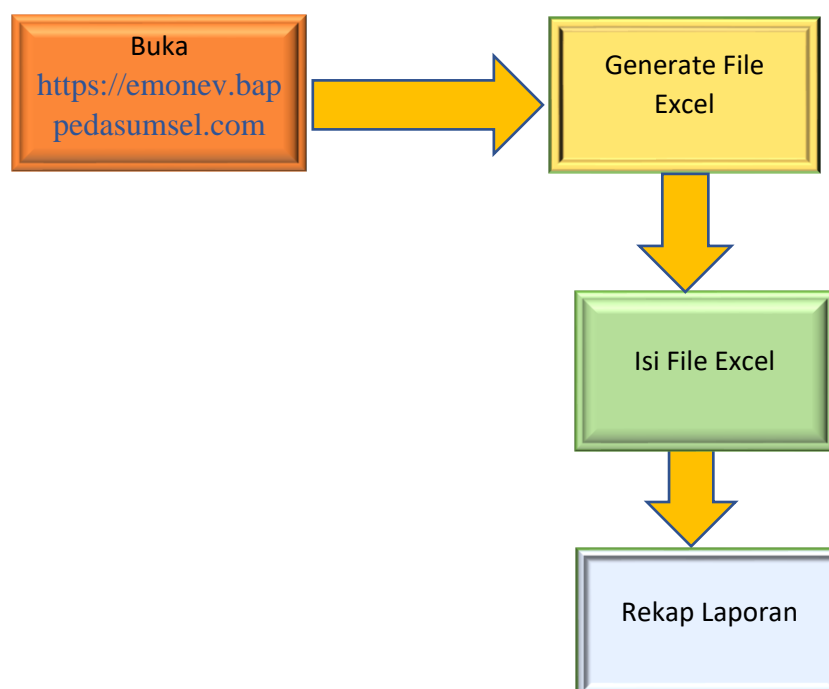


Gambar 2. Tampilan awal aplikasi *e-money* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2021.

Berdasarkan Pada Gambar 2. Terdapat 3 kategori fungsi dari *e-Monev* yang disediakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu.

1. Pada kategori pertama yaitu kategori APBD, terdapat target dan realisasi (Keuangan dan fisik) dari APBD (belanja langsung dan belanja tidak langsung) Provinsi Sumatera Selatan. Berikut alur input Pelaporan APBD melalui *e-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 3 Alur input Pelaporan APBD melalui sistem *e-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Sumber : Sub Bidang Pengendalian, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2021

2. Kategori kedua terdapat menu yang berisi APBN, yang terdiri atas:
 - a. Dekonsentrasi Provinsi
Berisi target dan realisasi (keuangan dan fisik) Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Tugas Pembantu Provinsi
Berisi target dan realisasi (keuangan dan fisik) Tugas Pembantu Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Urusan Bersama Kabupaten/Kota
Berisi target dan realisasi (keuangan dan fisik) Urusan Bersama yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
 - d. Tugas Pembantu Kabupaten/Kota
Berisi target dan realisasi (keuangan dan fisik) Tugas Pembantu yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
3. Hasil RKPD Kabupaten/Kota
Berisi hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan

Penggunaan Aplikasi Sistem *e-Monev* pada Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi stakeholders (Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pimpinan DPRD, serta Kepala BPKAD), yaitu :

1. Bagi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan:

- a Mempermudah dalam mendapatkan data, merekap dan melakukan fungsi pengendalian terhadap capaian realisasi capaian fisik dan keuangan APBD/APBN serta indikator RPJMD Provinsi Sumatera Selatan;
 - b Mempermudah dalam mendapatkan data, merekap dan melakukan fungsi pengendalian terhadap capaian realisasi fisik dan keuangan APBN Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
 - c Mempermudah dalam mendapatkan data, merekap dan melakukan fungsi pengendalian terhadap capaian fisik dan keuangan Dana Desa Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
 - d Mempermudah dalam mendapatkan data, merekap dan melakukan evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
 - e Sebagai data dasar penyusunan Bab II RKPD Provinsi Sumatera Selatan;
 - f Mempermudah pada saat penyusunan LKPI dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2019 yang akan datang.
2. Bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan:
- a Mempermudah dalam mengisi data capaian fisik keuangan APBD dan APBN, serta indikator RPJMD Provinsi Sumatera Selatan karena program, kegiatan, target dan indikator telah ada di sistem e-monev sehingga Perangkat Daerah hanya mengisi capaian dan realisasi saja.
 - b Mempermudah dalam mengontrol progress capaian fisik keuangan APBD dan APBN, serta indikator RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dimana dan kapan saja.

3. Bagi Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan:
 - a Mempermudah dalam mengisi data capaian fisik keuangan APBN, Dana Desa dan evaluasi hasil RKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan karena program, kegiatan, target dan indikator telah ada di sistem e-monev sehingga Kabupaten/Kota hanya mengisi capaian dan realisasi saja.
 - b Mempermudah dalam mengontrol progress capaian fisik keuangan APBN, Dana Desa dan evaluasi hasil RKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekda, Pimpinan DPRD, Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Kepala BPKAD Mempermudah dalam mengontrol progress capaian fisik dan keuangan APBD/APBN serta indikator RPJMD yang bisa dilakukan secara online dimana dan kapan saja.

2.6 Kerangka Teori Terkait Pengembangan Electronic Government

Menurut UNPAN (*United Nations Online Network in Public Administration and Finance*) terdapat 10 Indikator sukses dalam pengembangan *electronic government* terangkum dalam *World Public Sector Report 2003* pada Box 3 *Guiding Principles For Successful Electronic Government*, diperoleh Indikator-indikator untuk keberhasilan pengembangan *Electronic Government* yaitu dengan adanya (Rosady, 2018):

1. Ketersediaan pendanaan. (*avaibility of initial funding*)

Ketersediaan pendanaan dalam pengembangan *electronic government* menjadi salah satu faktor utama dalam proses keberhasilan pengembangan *electronic government*, di Indonesia sendiri pendanaan dalam pengembangan *electronic government* mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 03 tahun 2003 pada lampiran empatnya mengenai Kerangka Kebijakan Anggaran Pengembangan *Electronic Government* agar anggaran yang dapat dimanfaatkan secara efisien dan dapat menghasilkan daya

ungkit yang kuat bagi pembentukan tata-pamong yang baik. Dengan demikian diperlukan siklus perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pengevaluasian anggaran pengembangan *electronic government* yang baik, sehingga pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan strategis *electronic government* dapat berjalan secara efektif.

2. Keahlian dan budaya dari pelayanan masyarakat. (*skills and culture of the civil services*)

Keahlian dan budaya dari pelayanan masyarakat yang dimaksud adalah sumberdaya manusia yang dalam hal ini pegawai negeri sipil, menempati posisi teratas dalam kerangka konsep Suprastruktur mengingat bahwa unsur sumberdaya manusia menjadi penentu akhir dari keberhasilan pengembangan suatu sistem informasi. Secanggih apapun teknologi yang diterapkan dalam suatu sistem informasi tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa adanya sumber daya manusia yang mampu untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada.

3. Koordinasi. (*co-ordination*)

Koordinasi merupakan upaya untuk mempersatukan seluruh sumber daya sistem informasi yang ada pada setiap instansi, lembaga, kantor, dan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah dalam satu kerangka sistem informasi yang terpadu dan menyeluruh. Tujuan utama dari rencana pembangunan ini adalah selain untuk mengkoordinasikan seluruh sumberdaya informasi yang ada juga untuk mendorong pengembangan sistem informasi yang terencana, terintegrasi, terbuka secara efektif dan efisien pada setiap instansi, kantor maupun badan usaha milik pemerintah ditingkat pusat dan daerah.

4. Kerangka hukum. (*legal framework*)

Agar dapat memiliki legitimasi sebagai landasan hukum, maka penyusunan konsep Pengembangan infrastruktur sebuah Sistem Informasi suatu badan/Lembaga khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan harus berlandaskan hukum yang terkait, baik hukum secara langsung maupun tidak langsung, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga yang berkaitan, di Indonesia, landasan hukum yang berkaitan dengan implementasi maupun *pengembangan electronic government* secara nasional terdiri atas: Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang hak asasi manusia; Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers; Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Proenas 2000-2004; Sedangkan keputusan presiden yang terkait diantaranya adalah: Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; - Inpres 3/2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Keppres 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Menteri negara.

5. Infrastruktur informasi teknologi. (*ICT Infrastructure*)

Infrastruktur informasi teknologi diperlukan dalam perkembangan suatu sistem terutama dalam konteks membangun sebuah sistem yang memiliki jaringan yang luas. Dalam hal ini konteks infrastruktur informasi teknologi yang dimaksud merupakan infrastruktur dalam bentuk jaringan sistem *E-Monev* seperti kekuatan server *E-Monev*, jangkauan jaringan dan kecanggihan teknologi yang ada pada sistem *E-Monev*.

6. Kepemimpinan dan komitmen politis jangka panjang. (*political leaderships and long-term political commitment*)

Kepemimpinan dan komitmen politisi jangka Panjang merupakan salah satu faktor yang memiliki peran yang krusial terhadap suatu program pengembangan sebuah sistem atau aplikasi *electronic government* disuatu Lembaga nasional maupun lembaga daerah ataupun disuatu lingkup politik kekuasaan diwilayah tertentu, hal ini dikarenakan visi dan misi sebuah pemimpin saling memberikan keterikatan terhadap arah dan tujuan dari adanya diciptakannya suatu sistem dalam mewujudkan visi maupun

misi yang akan dicapai, salah satunya yaitu didalam membangun dan mewujudkan kualitas infrastruktur yang baik diperlukannya sebuah proses dan tahapan yang panjang seperti perencanaan, pengendalian/monitoring, dan evaluasi, tentunya pengaruh manajemen pembangunan dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas harus disertai dengan komitmen yang kuat dan inovasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk provinsi sumatera selatan sendiri proses pengendalian dan evaluasi pembangunan sudah dibantu dengan adanya inovasi sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang dikelola langsung oleh bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis.

7. Kesepakatan Publik. (*public engagement*)

Landasan dari kesepakatan public yang dimaksud ialah dari adanya kebutuhan masyarakat akan informasi yang transparan, inisiatif dari pemerintah untuk memperbaiki system informasi nasional yang ada, serta keinginan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga mencapai *Good Governance*, kemudian idealisme tersebut akan dituangkan dalam uprastruktur atau *i-fundamental* yang meliputi Kepemimpinan, Regulasi dan Sumber Daya Manusia sebagai landasan utama pengembangan sistem informasi nasional.

8. Perencanaan untuk pengembangan SDM dan infrastruktur teknis. (*plans for development of human capital and technical infrastructure*)

Perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia dimaksudkan adalah untuk menguatkan kemampuan dari tenaga ahli yang tersedia, seperti dilakukannya pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan dari sistem *E-Monev*, sedangkan infrastruktur teknis ialah fasilitas yang mendukung dan tersedia (kapasitas) seperti kualitas kecepatan internet, ketersediaan komputer dan sebagainya.

9. Monitoring dan evaluasi program *Electronic Government*. (*monitoring and evaluation*)

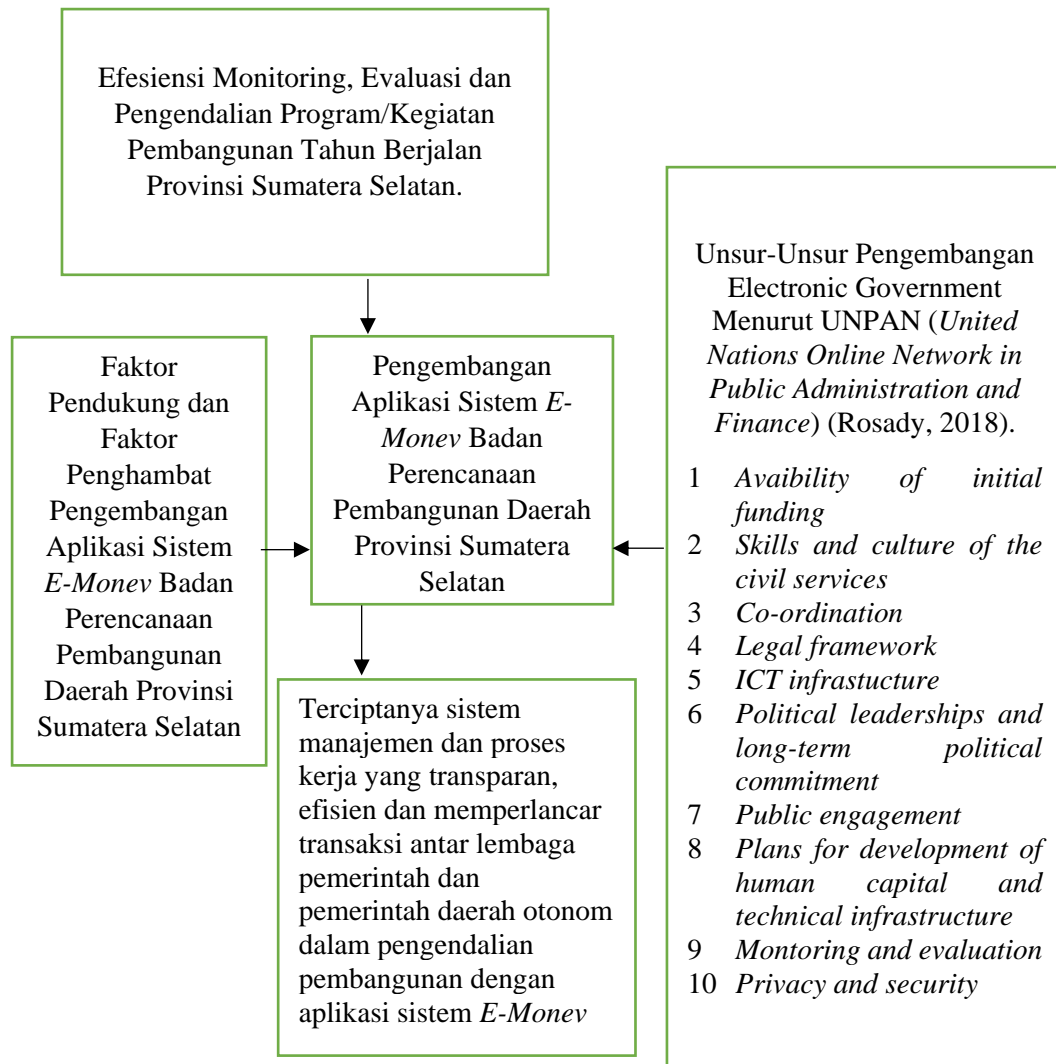
Monitoring dan evaluasi program *electronic government* digunakan dalam melihat perkembangan dan arah transformasi dari pengembangan sistem yang akan dilakukan sesuai dengan pengembangan aplikasi maupun sistem yang akan dibangun, tentunya dalam penelitian ini yang dimaksud adalah monitoring dan evaluasi dari program sistem *e-monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

10. Privasi dan keamanan dari transaksi. (*privacy and security*)

Privasi dan keamanan dari transaksi yang dimaksud ialah bagaimana sebuah sistem yang digunakan dan diterapkan oleh pemerintah dapat menjamin keamanan data, dari adanya proses transaksi/aktivitas maupun kegiatan pemerintah baik yang berkaitan dengan pelayanan, bisnis atau yang berkaitan dengan urusan antar pemerintah sendiri, hal ini dikarenakan untuk melihat dan mengetahui sebuah sistem yang canggih dapat dinilai dari bagaimana sebuah sistem atau aplikasi menjaga keamanan dan privasi data yang ada dalam tata kelola atau manajemen sistem itu bekerja.

2.7 Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran (1992) mendefinisikan bahwa, kerangka pikir merupakan bentuk konseptual tentang bagaimana teori berkaitan dengan beragam faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti, jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel *independent* dan *dependent*. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Berikut penulis sajikan kerangka pikir pada gambar 4 dibawah ini:



Gambar 4 Kerangka Pikir

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dimana menurut (Sugiyono, 2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Adapun Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu untuk mengangkat fakta, keadaan, gejala, kondisi dan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang (selama penelitian berlangsung) dan penyajian data yang apa adanya. Dengan menggunakan metode ini diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang pengembangan sistem *e-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2013) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan feasibilitas masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu. Suatu masalah dikatakan penting apabila masalah tersebut tidak dipecahkan melalui penelitian, maka akan semakin menimbulkan masalah baru. Masalah dikatakan urgen (mendesak) apabila masalah tersebut tidak segera dipecahkan melalui penelitian, maka akan semakin kehilangan berbagai kesempatan untuk mengatasi. Masalah dikatakan feasible apabila terdapat berbagai sumber daya untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk menilai masalah tersebut penting,

urgen, dan feasible, maka perlu dilakukan melalui analisis masalah. Di dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah dengan memfokuskan penelitian yaitu, sebagai berikut:

- 2 Analisis pengembangan sistem *e-Monev* badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada standarisasi pengembangan electronic government menurut UNPAN (*United Nations Online Network in Public Administration and Finance*), yang diantaranya : *avaibility of initial funding, skills and culture of the civil services, co-ordination, legal framework, ICT infrastructure, political leaderships and long-term political commitment, public engagement, plans for development of human capital and technical infrastructure, montoring and evaluation, privacy and security.*
- 3 Faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi pengembangan sistem *e-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun lokasi dari penelitian ini di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dari penelitian ini adalah manusia dan benda (Berwujud dan Tidak Berwujud). Manusia sebagai informan dalam arti sebagai subjek yang mengemukakan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti, sedangkan

benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan Benda Tak Berwujud Seperti Website dan Aplikasi serta dokumen penunjang lainnya yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas 2 jenis, yaitu data Primer dan Data Sekunder,

a. Data Primer

Menurut Umi Narimawati, Data primer adalah “data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.”(Pratiwi, 2017)

Pemilihan data primer berdasarkan pada kapasitas subjek penelitian yang dinilai dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara menyeluruh. Adapun yang menjadi data primer pada penelitian ini yaitu, Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis (PEPS) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Sub Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan OPD aplikasi *e-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Untuk memperkuat analisis data, penelitian ini juga harus ditunjang dengan data sekunder, Menurut Sugiyono Data sekunder ialah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. (Pratiwi, 2017).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti data statistic aplikasi, arsip data aplikasi, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Undang-Undang, jurnal, aplikasi *e-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta dokumen penunjang lainnya.

3.5 Key Informan (Informasi Kunci)

Berikut ini penulis sajikan Informasi Kunci pada penelitian ini, yaitu ;

Tabel 3. Informasi Kunci

No	Instansi	Jumlah
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	4
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	1
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang	1

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2021

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini menggunakan 35 teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara adalah proses interaksi percakapan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh data yang bersumber dari wawancara (*Interview*) atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara

Semiterstruktur (*Semi Structured Interview*) seperti yang dijelaskan oleh (Sidiq and Choiri, 2019) wawancara semistruktur merupakan proses pengambilan data yang memasuki kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Berikut ini Subjek yang diwawancarai oleh peneliti dijelaskan pada tabel 5 dibawah ini yaitu :

Tabel 4. Subjek Wawancara

No	Jabatan	Instansi
1	Kepala Sub Bagian Pengendalian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan pelaporan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4	Staff Pengendalian dan Pelaporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
5	Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6	Staff Pengendalian dan Pelaporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

Pada Penelitian Kualitatif, wawancara mendalam dapat dilakukan dengan, yaitu, cara *pertama*, wawancara sebagai strategi dalam konteks pengumpulan data yang diperlukan, pada konteks ini catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkrip wawancara. Dan cara *Kedua* wawancara sebagai penunjang lain dalam pengumpulan data seperti analisis dokumen dan studi literatur serta data penunjang lainnya.

2. Observasi

Metode Survei atau metode observasi merupakan Teknik pengumpulan data kedua yang digunakan peneliti untuk mencari dan menggali informasi-

informasi data secara mendalam, menurut Gordon E Mills mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses kegiatan yang terstruktur dan terencana dengan fokus utamanya untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut (Sidiq and Choiri, 2019). Sedangkan menurut Adler mengungkapkan bahwa observasi salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. (Hasanah, 2017).

Adapun yang menjadi objek dari observasi ini adalah, Aplikasi *e-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan informan bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, serta kasub bidang pengendalian Bappeda Litbang Kota Palembang dan sebagainya.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Seperti yang dikemukakan oleh GJ. Renier, sejarawan terkemuka dari *University College* London menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian, *pertama* dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan, *kedua* dalam arti sempit yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja, *ketiga* dalam arti spesifik yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya. Sugiyono menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sidiq and Choiri, 2019)

Pada penelitian ini studi dokumentasi dilakukan dengan memiliki tujuan untuk mencari data sekunder, karena pada dasarnya penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif membutuhkan data sekunder seperti, Arsip data aplikasi, statistik aplikasi, Undang-Undang, surat keputusan pemerintah, peraturan pemerintah, instruksi presiden, surat

edaran gubernur Sumatera Selatan, undang-undangan, jurnal, website resmi Bappeda Sumatera Selatan dan dokumen penunjang lainnya sebagai penguat dari validitas data yang didapat.

3.7 Validitas Data

Dalam Penelitian kualitatif keabsahan data menjadi kunci utama keberhasilan dalam penelitian ini, untuk memenuhi syarat validitas dan reliabilitas agar penelitian ini tidak diragukan dan mendapatkan kepercayaan serta untuk memenuhi kriteria kredibilitas (Validitas Internal), ada beberapa cara yang dapat digunakan menurut Moleong, memberikan penjelasan tentang cara yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data (Kebenaran/validitas data kualitatif), yaitu sebagai berikut (Kusumastuti and Ahmad, 2019) :

1. Ketekunan/Keajegan Pengamatan

Dengan keseriusan/Keajegan pengamatan berarti peneliti berupaya untuk mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau *tentative*. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat

2. Triangulasi

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin dalam Moleong, (2010) membedakan empat macam triangulasi sebagai pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- a Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
- b Mengecek dengan berbagai sumber data.
- c Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan

Dalam penelitian ini triangulasi data menggunakan Teknik Triangulasi sumber, dimana metode ini dipakai untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber terhadap informasi yang diberikan.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Untuk meningkatkan kepercayaan akan kebenaran dan keabsahan data maka, peneliti menggunakan bahan dokumentasi seperti, rekaman hasil wawancara dengan subjek penelitian atau bahan dokumentasi yang diambil dengan cara tidak mengganggu atau menarik perhatian informan, sehingga informasi yang didapatkan memiliki validitas yang tinggi.

4. Mengadakan Member Check

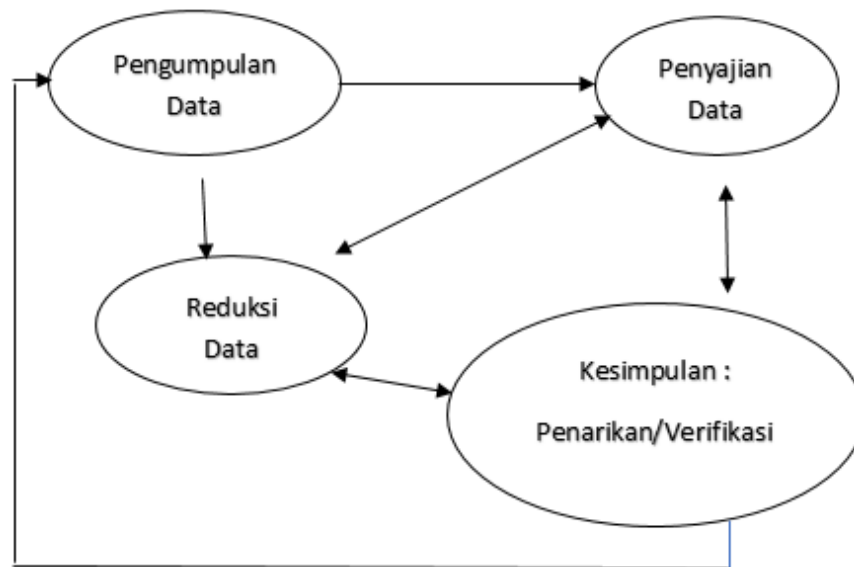
Salah satu yang sangat penting ialah mengadakan member check pada akhir wawancara dengan menyebutkan garis besarnya dengan tujuan agar responden dapat memperbaiki apabila data yang disampaikan ada kekeliruan, atau menambahkan data yang kurang. Dengan adanya member check maka, informasi yang diperoleh oleh dan penulisan laporan sesuai dengan yang dimaksud oleh informan.

3.8 Teknik Analisis Data

Sebagai suatu syarat sebuah informasi dapat dijadikan sebagai data penelitian, perlu diperiksa kredibilitasnya, agar dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai titik tolak penarikan simpulan, data penelitian dikatakan valid apabila sesuai dengan masalah yang diteliti, dan reliabel apabila terdapat secara meyakinkan pada beberapa sumber atau diuji data diperoleh atau dikumpulkan dengan melalui beberapa teknik yang berbeda (Nugrahani and

Hum, 2014). Berdasarkan informasi dan data yang telah diperoleh melalui tahapan wawancara, observasi dan dokumentasi perlu dilakukan analisis dan pengolahan data secara akurat dan seksama untuk diberi makna dan ditarik sebuah kesimpulan. Menurut Creswell menjelaskan dalam penelitian kualitatif bahwa, analisis data adalah usaha peneliti dalam memaknai dan memahami data, baik berupa teks, gambar atau data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan data lainnya yang dilakukan secara menyeluruh (Sidiq and Choiri, 2019). Dalam Penelitian ini, pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan 3 alur kegiatan secara bersamaan, yaitu, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

1. Reduksi data sendiri merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memfokuskan, memilih, mengurangi, dan Menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan.
2. Penyajian data adalah mengorganisasi dan menyajikan data baik berupa naratif, table, matrik maupun bentuk penyajian data lainnya. Dalam Penelitian kualitatif penyajian data biasa dilakukan dan digunakan dalam bentuk uraian singkat, hubungan kategori dan lain sebagainya. Dalam konteks ini Miles dan Huberman menjelaskan bahwa “penyajian data yang biasa digunakan pada penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif” (Sidiq and Choiri, 2019).
3. Penarikan kesimpulan atau menyimpulkan data merupakan proses pengambilan intisari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk uraian singkat akan tetapi tetap mempertahankan konsep dan pemikiran yang luas. Untuk lebih jelasnya terkait dengan kegiatan analisis data pada penelitian ini, penulis menyajikan bagan sebagai berikut:



Gambar 5 *Komponen Analisis Data*

Sumber : Miles dan Huberman (Rijali, 2019)

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data, dalam tahap ini proses pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Dalam hal ini, reduksi data yang dilakukan dengan memfokuskan pada hasil penelitian yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Penelitian difokuskan pada data yang didapat berdasarkan studi wawancara, observasi dan dokumentasi dari pihak-pihak yang terkait pada badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

3. Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dalam penelitian ini penyajian data diawali dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber dan dilanjutkan dengan menyajikan data atau temuan yang dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dan metode pengumpulan data obeservasi, baik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan maupun di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

4. Kesimpulan

Dalam tahap ini, penulis memberikan uraian atau pernyataan singkat terhadap Pengembangan *e-government* Dengan Studi *e-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, secara umum proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan (data mentah), kemudian ditulis Kembali dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data, setelah data dirangkum, direduksi, dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program pengembangan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 menurut indikator 10 Indikator sukses dalam pengembangan *electronic government* dari UNPAN (*United Nations Online Network in Public Administration and Finance*) yang dipakai dalam penelitian ini terdapat 7 indikator yang memiliki peranan kuat terhadap implementasi kebijakan pengembangan sistem *E-Monev* dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, yang dimana tahun 2021 terdapat beberapa perubahan pola sistem tata kelola pembangunan di Sumatera Selatan dengan menggunakan media internet, sehingga dapat memberikan kontribusi pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi sistem tata kelola pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dialokasikannya sumber daya (Manusia,*financial*, tenaga,informasi) dan dengan dibangunnya berbagai berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung di lingkungan kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi faktor pendukung keberhasilan pengembangan sistem *E-Monev* tahun 2021, dan:
3. Tidak tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidang Ilmu Telekomunikasi (IT) menjadikan faktor penghambat dari pengembangan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang saat ini masih tergantung dan didampingi oleh pihak ketiga.

5.2 Saran

1. Perlunya pengalokasian dan pemerataan Sumber Daya yang menyeluruh di tataran pemerintah provinsi Sumatera Selatan agar dapat memberikan keseimbangan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya khususnya bagi organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan keberhasilan dari setiap program kebijakan yang dilaksanakan.
2. Secara teknis perlunya peningkatan kreativitas pada menu di sistem *E-Monev* agar tidak terlalu terlihat sangat sederhana dan tidak memberikan rasa bosan kepada para pengguna sistem ini.
3. Untuk kedepannya diharapkan sistem *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dapat dikembangkan dengan bekerjasama kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan untuk meminimalisir hambatan dengan pihak pengembang.
4. Perlunya evaluasi sistem *E-monev* setiap tahunnya mengenai tingkat kepuasan dari para pengguna yaitu dari Organisasi Perangkat Daerah Sumatera Selatan terhadap pelayanan yang diberikan dan keberlanjutan sistem tata kelola manajemen pemerintahan dan tata kelola manajemen pembangunan melalui sistem ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bwalya, Kelvin J. 2018. Decolonisation of e-Government Research and Practice: Exploring Contextual Issues and Opportunities in Africa *Decolonisation of E-Government Research and Practice: Exploring Contextual Issues and Opportunities in Africa*. DurbandVille, South Africa: AOSIS. doi: 10.4102/aosis.2018.bk72.
- Arikunto, Suharsimi, and Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2018. *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa Dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksar.
- Indrajit, Richardus Eko. 2016. *Konsep Dan Strategi Electronic Government*. Yogyakarta.
- Kato, Iskandar et al. 2021. *Manajemen Pembangunan Daerah*. 1st ed. Medan: Yayasan Kita Menlis.
- Kusumastuti, Adhi, and Khoiron. M. Ahmad. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif. Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)*. Semarang.
- Laumer, Sven, and Andreas Eckhardt. 2012. 28 Springer *Enacting Electronic Government Succes : An Integrative Study of Government-Wide Websites, Organizational Capabilities, and Institutions*. Mexico: Springer. doi: 10.1007/978-1-4614-2015-6.
- Sidiq, Umar, and Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. ed. Anwar Mujahidin. Ponorogo: Nata Karya.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Thomas, Vinod, and Namrata Chindarkar. 2019. Economic Evaluation of Sustainable Development *Economic Evaluation of Sustainable Development*. Singapore: Springer Nature.

<http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/23183>. doi: 10.1007/978-981-13-6389-4.

Nugrahani, Farida, and M. Hum. 2014. 1 *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta.
<http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>.

Jurnal

Adelia, Tiara et al. 2016. “Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Government Kantor Imigrasi Kelas II Karawang Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Keimigrasian Melalui Internet.” *e-Proceeding of Management* 3(2): 2517–26.
<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/2215>.

Dakhi, Yohannes. 2016. “Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu.” *Jurnal Warta* 53(9): 1679–99.
<https://media.neliti.com/media/publications/290701-implementasi-poac-terhadap-kegiatan-orga-bdca8ea0.pdf>.

Hasanah, Hasyim. 2017. “TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqaddum* 8(1): 21. doi: 10.21580/at.v8i1.1163.

Muftikhali, Qilbaaini Effendi, and Tony Dwi Susanto. 2017. “Kumpulan Model Maturity E-Government: Sebuah Ulasan Sistematis.” *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 4(4): 311.
<https://jtiik.ub.ac.id/index.php/jtiik/article/view/367>. doi:
<http://dx.doi.org/10.25126/jtiik.201744367>.

Novita, Dien. 2014. “Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government: Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan.” *Eksplora*

Informatika 4(1): 43–52. <http://ejournal.stikom-bali.ac.id/index.php/0f410362/article/view/644>.

Nugraha, Joko Tri. 2018. “E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman).” *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* 2(1): 32–42. <http://dx.doi.org/10.31002/jkkm.v2i1.758>. doi: 10.31002/jkkm.v2i1.758.

Nugrahani, Farida, and M. Hum. 2014. *1 Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta. <http://ejournal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>.

Pratiwi, Nuning Indah. 2017. “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1(2): 202–24. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219>. doi: 10.38043/jids.v1i2.219.

Rosady, Teddy. 2018. “STANDARISASI PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT BERDASARKAN UNPAN (United Nations Online Network in Public Administration and Finance) UNTUK INDONESIA.” *Administraus* 2(2): 135–50.

Utama, A.A Gde Satia. 2020. “The Implementation of E-Government in Indonesia.” *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478) 9(7): 190–96. doi: 10.20525/ijrbs.v9i7.929.

Peraturan/Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang “tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang

daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah”.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang “tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan”.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 001/SE/BAPPEDA/2021 Tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021

Website

Dwi Aprini 2021. *Sumsel Raih Provinsi Terinovatif di Indonesia 2021 dari Kemendagri*. Diakses Pada 20 Februari 2022 pukul 20:37, di laman <https://mediaindonesia.com/nusantara/461194/sumsel-raih-provinsi-terinovatif-di-indonesia-2021-dari-kemendagri#:~:text=PROVINSI%20Sumatra%20Selatan%20dinobatkan%20sebagai,indeks%20tertinggi%20sebesar%2079%2C51>.

Kemenpanrb 2021. *Hasil Survei PBB, E-Government Indonesia Naik Peringkat*. Diakses Pada Tanggal 10 September 2021 Pukul 06.30, di laman: <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/hasil-survei-pbb-e-government-indonesia-naik-peringkat>

Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Selatan. *Luas_Wilayah (KM2), 2019-2020*. Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2021 13.00, di laman : <https://sumsel.bps.go.id/indicator/153/201/1/luas-wilayah.html>

Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Selatan. *Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Termasuk Angkatan Kerja (Jiwa), 2019-2020*. Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2021 13.20, di laman:

<https://sumsel.bps.go.id/indicator/6/317/1/jumlah-penduduk-15-tahun-keatas-termasuk-angkatan-kerja.html>